

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di dunia semakin maju dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, antara lain adalah *powerpoint* dan internet. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menunjang efisiensi dan kemudahan dalam proses pembelajaran oleh guru dan siswa. Dengan kondisi tersebut, jika pendidikan di Indonesia tidak mengimbangi maka akan tertinggal dari negara lain. Kurikulum yang lama yaitu KTSP ternyata sudah tidak sesuai dengan pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan kurikulum baru yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Kurikulum 2013 adalah kurikulum pengganti KTSP yang dicita-citakan mampu menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Fungsi dan tujuan Pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 adalah sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara singkatnya, undang-undang tersebut berharap pendidikan dapat membuat peserta didik menjadi kompeten dalam bidangnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah disampaikan di atas, harus mencakup kompetensi

dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, telah ditetapkan visi pendidikan tahun 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual dan cerdas sosial/emosional dalam ranah sikap, cerdas intelektual dalam ranah pengetahuan, serta cerdas kinestetis dalam ranah keterampilan. Dengan demikian Kurikulum 2013, dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia (Kemdikbud, 2013:82).

Kurikulum 2013 SMP pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas VII memuat beberapa materi, seperti materi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma, memaknai nilai sejarah NKRI, pentingnya daerah dalam bingkai NKRI, memelihara semangat persatuan Indonesia serta bertoleransi dalam keberagaman. Materi-materi di atas diharapkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional.

Kurikulum 2013 mulai diujicobakan pada tahun pelajaran 2013/2014 di beberapa sekolah negeri dan swasta yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Target pemerintah menerapkan kurikulum 2013 di semua sekolah dan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMK, dan SMA pada

tahun 2016/2017 ternyata menemui banyak kendala, karena tidak semua kalangan menyambut baik usulan penerapan kurikulum baru tersebut.

Kenyataan terkait implementasi Kurikulum 2013 di sejumlah daerah masih bermasalah. Buku-buku belum terdistribusi dengan baik, guru-guru merasa pelatihan belum optimal, dan pemerintah kabupaten/kota mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Selain itu para guru, kepala sekolah, dan pengurus yayasan belum banyak mengetahui desain induk kurikulum 2013, artinya sosialisasi kurikulum tersebut masih belum maksimal. Mereka hanya tahu kerangkanya saja, melalui jargon dalam bentuk *powerpoint* yang selalu dipaparkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidaktahuan secara menyeluruh isi kurikulum tahun 2013 ironisnya disambut pemerintah daerah yang ingin melaksanakan kurikulum 2013 di semua jenjang sekolah seluruh wilayah Indonesia (Tribunnews, Juli 2013).

Selanjutnya, sekolah kebingungan dengan perubahan struktur kurikulum. Masalah teknis berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum ini menyebabkan ada beberapa mata pelajaran yang dihilangkan atau bertambah jam mengajar, pada akhirnya membingungkan sekolah karena semuanya berimplikasi pada nasib guru. Misalnya penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer di SMP dan SMA, berimplikasi besar terhadap eksistensi para pengampu bidang TIK yang latar belakang pendidikannya TIK dan penambahan jam pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menguntungkan guru pengampu mata pelajaran tersebut.

Sekolah jenjang SMA bingung melakukan peminatan atau penjurusan karena tidak ada pedoman khusus pelaksanaannya. Muncul masalah ketika

peminatan di SMA diberlakukan begitu murid masuk kelas I. Masalah yang akan timbul adalah persoalan manajerial baru tentang persyaratan peminatan. Terutama bila para murid baru memilih jurusan atau peminatan di kelompok tertentu, misalnya kelompok matematika dan IPA saja. Terakhir, soal penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan diprediksi membebankan sekolah swasta. Kurikulum baru bagi sekolah swasta, mengharuskan pihak sekolah harus menambah pembayaran jam mengajar dan sekolah harus memfasilitasi peningkatan kualitas gurunya lewat pelatihan (Tribunnews, Juli 2013).

Menurut Sukmadinata dalam Khaeruddin, dkk (2007:4), kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan pada segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 hadir sebagai kurikulum terbaru yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, namun dalam implementasinya yang telah diujicobakan di beberapa sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesiapan pemerintah seperti materi kurikulum tahun 2013 yang belum matang, anggaran untuk pelaksanaan kurikulum 2013 yang belum sepenuhnya siap, pengadaan serta pendistribusian buku kurang maksimal, minimnya sosialisasi, dan pelatihan bagi guru masih minim yaitu hanya pemberian teori melalui *powerpoint* oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berakibat kurangnya pemahaman guru mengenai kurikulum tahun 2013.

Berkaitan dengan salah satu fungsi kurikulum sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran maka dalam pembuatan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) harus sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh kurikulum tahun 2013. Tanpa adanya rencana maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Rencana pembelajaran yang dibuat dengan baik akan menentukan proses dan hasil yang baik pula. Dengan implementasi kurikulum 2013 yang belum maksimal sesuai penjelasan paragraf sebelumnya maka penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga mengalami kendala-kendala karena kurangnya pemahaman guru mengenai tata cara pembuatannya.

Hasil wawancara awal dengan guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu yaitu ibu Supanti pada tanggal 8 Januari 2014 dapat disimpulkan bahwa terkait penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tahun 2013 masih terdapat kesulitan seperti harus menggunakan pendekatan saintifik yang sebelumnya belum pernah digunakan. Format RPP tidak jelas karena tidak ada contoh pasti dari pemerintah dan penilaian yang sedikit rumit.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan studi kasus di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji implementasi kurikulum tahun 2013 khususnya penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?
2. Apa kendala implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga-negaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?
3. Apa solusi untuk mengatasi kendala implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?

2. Untuk mendeskripsikan kendala implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?
3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala implementasi kurikulum tahun 2013 dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut ini.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - b. Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai kurikulum tahun 2013.

- b. Manfaat bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tahun 2013.
- c. Manfaat bagi siswa, dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum tahun 2013 oleh guru maka proses pembelajaran akan lebih maksimal.

E. Daftar Istilah

1. Kurikulum : Alat untuk mencapai tujuan pendidikan, perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dokumen dan diterapkan dalam kelas.
2. RPP : Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar
3. PPKn : Nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah, untuk membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari